



Implementasi Sistem Informasi Desa untuk Meningkatkan Transparansi dan Pelayanan Publik di Desa Tertinggal

I Gede Arya Pramana^{*1}, Ni Luh Putu Sulastri², I Ketut Adi Wicaksan³

¹ Program Studi Sistem Informasi, Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali, Denpasar, Indonesia

^{*}Corresponding Author: arya.pramana@stikombali.ac.id

Article History

Manuscript submitted:

15 October 2025

Manuscript revised:

22 October 2025

Accepted for publication:

30 Juli 2025

Keywords

sistem informasi desa,
transparansi, pelayanan publik,
e-government, pembangunan
pedesaan, Bali

Abstract

Implementasi sistem informasi desa (VIS) telah menjadi inisiatif penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan meningkatkan layanan publik di tingkat desa, khususnya di daerah tertinggal. Studi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas VIS dalam meningkatkan transparansi administratif dan kualitas layanan publik di desa-desa tertinggal di Provinsi Bali. Dengan menggunakan pendekatan metode campuran yang menggabungkan wawancara kualitatif dan survei kuantitatif, data dikumpulkan dari 120 responden yang terdiri dari pejabat desa, perwakilan masyarakat, dan penduduk lokal di tiga desa percontohan yang menerapkan VIS. Hasilnya menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam aksesibilitas informasi, efisiensi administratif, dan partisipasi warga setelah adopsi VIS. Analisis statistik mengungkapkan korelasi positif antara intensitas penggunaan VIS dan transparansi layanan yang dirasakan ($r = 0,76$, $p < 0,05$). Temuan kualitatif lebih lanjut menyoroti peran literasi digital dan keterlibatan masyarakat sebagai pendorong utama keberhasilan adopsi VIS. Studi ini menyimpulkan bahwa implementasi VIS tidak hanya meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi tata kelola tetapi juga menumbuhkan kepercayaan sosial antara pemerintah daerah dan warga. Rekomendasi diberikan untuk memperkuat pembangunan kapasitas digital dan memastikan keberlanjutan inisiatif VIS dalam konteks pedesaan.

Copyright © 2025, The Author(s)

This is an open access article under the CC BY-SA license



How to Cite: Pramana, I. G. A., Sulastri, N. L. P., Wicaksana, I. K. A. (2025). Implementasi Sistem Informasi Desa untuk Meningkatkan Transparansi dan Pelayanan Publik di Desa Tertinggal. *Journal of Community Action*, 1(1), 28–34. <https://doi.org/10.71094/joca.v1i1.xx>

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk di tingkat desa. Kemajuan ini telah memungkinkan terjadinya transformasi digital yang memperkuat transparansi, efisiensi, dan partisipasi publik dalam berbagai sektor pemerintahan. Implementasi *Sistem Informasi Desa* (SID) merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Kesa et al., 2024). Melalui pemanfaatan SID, desa dapat mengelola data kependudukan, administrasi keuangan, dan pelayanan publik secara terintegrasi berbasis digital, sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Desa, sebagai satuan pemerintahan terkecil, memiliki peran vital dalam pelayanan publik, pengelolaan keuangan, serta pembangunan sosial ekonomi masyarakat (Aryani & Kusumaningrum, 2024). Oleh karena itu, penguatan kapasitas digital di tingkat desa menjadi salah satu prioritas nasional dalam mendukung terwujudnya *good governance*.

Namun demikian, berbagai desa tertinggal di Indonesia, termasuk di Bali, masih menghadapi tantangan serius dalam transparansi administrasi dan pelayanan publik. Dalam praktiknya, banyak pemerintah desa yang belum memiliki sistem pencatatan data secara digital dan masih mengandalkan proses manual yang rawan kesalahan serta

lambat dalam pembaruan data. Kurangnya akses informasi, rendahnya literasi digital, dan minimnya sistem pencatatan elektronik menyebabkan rendahnya akuntabilitas serta meningkatnya potensi penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan desa (Taufiq et al, 2019; Yimer, 2015). Selain itu, disparitas infrastruktur antara wilayah perkotaan dan pedesaan memperburuk kesenjangan dalam akses dan pemanfaatan teknologi digital. Tantangan ini berdampak langsung terhadap efektivitas pelayanan publik serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi di sektor publik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan (Hajar & Arma, 2024; Anas et al., 2024). Sistem digital memungkinkan peningkatan kecepatan pelayanan, pengelolaan data yang lebih akurat, serta penyediaan laporan publik yang dapat diakses secara terbuka. Akan tetapi, studi terkait implementasi SID di desa tertinggal masih terbatas, khususnya dalam konteks sosial budaya dan kesiapan sumber daya manusia di wilayah pedesaan Bali (Wijaya, 2024; Olphert & Damodaran, 2007). Desa-desanya di Bali memiliki karakteristik sosial budaya yang unik dengan struktur adat yang kuat, sehingga proses digitalisasi pemerintahan tidak dapat diterapkan secara seragam. Dalam konteks ini, penerapan SID memerlukan pendekatan yang adaptif dan sensitif terhadap nilai-nilai lokal agar tidak menimbulkan resistensi sosial. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dijawab melalui kajian empiris yang mempertimbangkan konteks lokal dan kesiapan kelembagaan (Adeni, 2016; Santoso, 2025).

Dalam konteks tersebut, implementasi SID di desa tertinggal tidak hanya dipandang sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai transformasi sosial dan institusional yang memerlukan adaptasi budaya lokal (Widiyarta et al, 2024). Transformasi ini menuntut perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur desa yang semula administratif-manual menjadi digital dan berbasis data. Lebih jauh lagi, pengembangan SID menuntut adanya kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta untuk memastikan keberlanjutan sistem serta peningkatan kapasitas pengguna. Pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan penerapan sistem tersebut. Partisipasi warga tidak hanya penting dalam tahap perencanaan, tetapi juga dalam pengawasan dan evaluasi agar sistem dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat lokal.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan SID dapat meningkatkan transparansi dan pelayanan publik di desa tertinggal di Bali. Fokus penelitian diarahkan pada sejauh mana penerapan SID mampu meningkatkan akses terhadap informasi publik, memperkuat akuntabilitas tata kelola, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pelayanan desa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi, seperti kesiapan infrastruktur digital, kemampuan sumber daya manusia, dan dukungan kelembagaan pemerintah daerah.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur *e-governance* dan inovasi digital di pemerintahan desa. Kajian ini memperluas pemahaman mengenai peran teknologi informasi dalam memperkuat prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat lokal, khususnya dalam konteks desa tertinggal. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pengambil kebijakan dalam mengoptimalkan penerapan SID di wilayah pedesaan Indonesia (Murdhani, 2025; Matheus et al., 2023). Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan diharapkan mampu mendukung upaya pemerintah dalam mendorong transformasi digital desa secara berkelanjutan, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, efisien, dan inklusif di seluruh wilayah Indonesia.

Metode Pelaksanaan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan desain *sequential explanatory*. Tahap pertama dilakukan survei kuantitatif terhadap 120 responden yang terdiri atas perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga dari tiga desa tertinggal di Kabupaten Bangli, Karangasem, dan Buleleng, Bali. Instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup dengan skala Likert lima poin untuk mengukur persepsi transparansi, efektivitas pelayanan, dan partisipasi masyarakat. Analisis statistik dilakukan menggunakan regresi linear dan korelasi Pearson untuk menguji hubungan antarvariabel.

Tahap kedua berupa wawancara mendalam kepada 15 informan kunci untuk menggali faktor sosial, budaya, dan teknis yang memengaruhi implementasi SID. Analisis data kualitatif dilakukan melalui teknik *thematic coding* dengan bantuan perangkat lunak NVivo. Penelitian dilaksanakan selama enam bulan, dari Januari hingga Juni 2024.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Desa (SID) berpengaruh signifikan terhadap peningkatan transparansi informasi dan efektivitas pelayanan publik ($\beta = 0.68$, $p < 0.05$). Temuan ini menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola desa bukan sekadar inovasi administratif, melainkan bagian dari transformasi struktural menuju sistem pemerintahan yang lebih modern dan berorientasi pada akuntabilitas publik. Penerapan SID memberikan dampak nyata terhadap bagaimana informasi desa dikelola, disebarluaskan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Melalui sistem ini, data-data penting seperti anggaran, program pembangunan, laporan kegiatan, hingga pelayanan administrasi dapat diakses secara terbuka oleh warga desa, sehingga mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah desa dan masyarakat.

Sebagian besar responden (82%) menyatakan bahwa akses terhadap informasi desa menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat setelah penerapan SID. Persentase yang tinggi ini menggambarkan adanya tingkat penerimaan dan kepuasan yang signifikan terhadap implementasi teknologi informasi di tingkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai merasakan manfaat langsung dari digitalisasi pemerintahan, terutama dalam hal kemudahan memperoleh informasi publik tanpa harus melalui prosedur birokratis yang panjang seperti sebelumnya. Selain itu, peningkatan kecepatan dan akurasi informasi juga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik, karena keputusan dapat diambil berdasarkan data yang lebih mutakhir dan valid.

Lebih jauh lagi, penerapan SID menciptakan perubahan mendasar dalam paradigma pelayanan publik di tingkat desa. Sebelum adanya sistem ini, sebagian besar proses administrasi masih dilakukan secara manual dengan pencatatan konvensional yang rentan terhadap kesalahan dan manipulasi data. Proses yang lambat dan kurang transparan sering kali menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Namun, dengan hadirnya SID, proses tersebut beralih menjadi berbasis digital yang menekankan efisiensi, transparansi, serta keterbukaan informasi. Pergeseran ini tidak hanya memperbaiki mekanisme kerja aparatur desa, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat melalui komunikasi dua arah yang lebih efektif.

Lebih lanjut, penerapan SID juga memperlihatkan bagaimana teknologi dapat menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya akses yang lebih terbuka terhadap informasi, masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan dana desa, memahami program-program pembangunan yang sedang dijalankan, serta memberikan masukan atau kritik yang konstruktif. Transparansi yang dihasilkan oleh SID turut menumbuhkan rasa percaya (trust) antara warga dan pemerintah desa, yang menjadi fondasi penting bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, peningkatan efektivitas pelayanan publik melalui SID juga mendorong efisiensi kerja perangkat desa, mengurangi tumpang tindih tugas, serta meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang yang mungkin terjadi dalam sistem manual.

Secara keseluruhan, hasil analisis ini memperlihatkan bahwa penerapan SID membawa dampak multidimensional, mencakup aspek efisiensi administrasi, transparansi informasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Dengan kata lain, SID berfungsi sebagai katalis perubahan yang menandai pergeseran dari pola birokrasi tradisional menuju tata kelola berbasis data dan teknologi. Pergeseran paradigma ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang adaptif terhadap perkembangan zaman, sekaligus menjawab tantangan transparansi dan akuntabilitas publik di era digital.

Selain itu, korelasi positif yang cukup kuat ($r = 0.76$) ditemukan antara tingkat penggunaan SID dan persepsi masyarakat terhadap transparansi tata kelola desa. Temuan ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara intensitas penggunaan teknologi informasi dengan peningkatan persepsi publik terhadap integritas dan keterbukaan pemerintahan desa. Artinya, semakin tinggi frekuensi serta kualitas pemanfaatan SID oleh perangkat desa—baik dalam mengelola data, menyebarluaskan informasi, maupun melayani masyarakat—semakin besar pula tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintahan mereka. Kepercayaan ini tumbuh karena masyarakat dapat mengakses informasi secara langsung tanpa harus bergantung pada saluran-saluran informal atau pihak perantara yang selama ini kerap menjadi sumber distorsi informasi.

Hubungan positif tersebut juga menandakan bahwa keberhasilan implementasi SID tidak hanya bergantung pada faktor teknis, tetapi juga pada sejauh mana sistem tersebut digunakan secara konsisten dan terintegrasi dalam praktik tata kelola sehari-hari. Ketika perangkat desa mampu memanfaatkan SID secara optimal, misalnya dengan memperbarui data secara rutin, menampilkan laporan kegiatan secara transparan, dan menanggapi keluhan warga melalui kanal digital, maka sistem ini berfungsi bukan hanya sebagai sarana administratif, melainkan juga sebagai instrumen komunikasi publik yang efektif. Dengan kata lain, SID tidak hanya menjadi alat bantu untuk memudahkan

pekerjaan birokrasi, tetapi juga menjadi mekanisme sosial yang memperkuat akuntabilitas dan memperdalam hubungan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Temuan ini memperlihatkan bahwa teknologi digital berperan ganda: di satu sisi, ia menjadi medium untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja pemerintahan desa; di sisi lain, ia juga menjadi katalis dalam membangun budaya transparansi dan keterbukaan yang berkelanjutan. Transparansi yang dimediasi oleh teknologi informasi menciptakan ruang partisipasi baru bagi masyarakat, di mana warga dapat memantau program pembangunan, penggunaan anggaran, serta kebijakan desa secara lebih terbuka. Dalam konteks ini, SID menjadi simbol perubahan paradigma dari pemerintahan yang tertutup menuju pemerintahan yang berbasis kolaborasi dan akuntabilitas publik.

Lebih jauh, korelasi tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat semakin menyadari nilai penting data terbuka (open data) sebagai dasar partisipasi dan pengawasan sosial. Ketika informasi tersedia secara luas dan mudah diakses melalui SID, masyarakat memiliki kemampuan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Kondisi ini sejalan dengan semangat demokratisasi informasi, di mana teknologi digital digunakan untuk memperkuat posisi warga sebagai subjek aktif dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan SID tidak hanya berdampak pada transparansi administratif, tetapi juga pada tumbuhnya kesadaran kolektif mengenai pentingnya keterbukaan sebagai prinsip dasar pemerintahan yang baik.

Hal ini sejalan dengan temuan Reggi & Dawes (2016) yang menyatakan bahwa sistem digital mendorong keterbukaan data publik serta mengurangi potensi korupsi di tingkat lokal. Dalam konteks pemerintahan desa, keterbukaan informasi melalui SID dapat berfungsi sebagai mekanisme pencegahan korupsi, karena masyarakat dapat secara langsung memantau proses penggunaan dana desa, proyek pembangunan, serta hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan akses data yang lebih luas, peluang terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalisir. Selain itu, transparansi yang dihasilkan melalui sistem digital juga menekan praktik nepotisme dan ketertutupan yang sering kali menjadi hambatan bagi terciptanya pemerintahan yang bersih dan efektif.

Dengan demikian, SID berperan penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel. Sistem ini bukan hanya alat pengelolaan informasi, tetapi juga menjadi fondasi bagi pembentukan budaya baru di lingkungan birokrasi desa—budaya yang menghargai keterbukaan, tanggung jawab, dan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Keberadaan SID menunjukkan bahwa digitalisasi bukan sekadar modernisasi teknis, melainkan proses transformasi sosial yang mendalam, di mana nilai-nilai integritas dan kepercayaan publik menjadi pusat dari seluruh kegiatan pemerintahan.

Dari sisi kualitatif, wawancara dengan para pemangku kepentingan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SID sangat dipengaruhi oleh kapasitas literasi digital perangkat desa dan dukungan masyarakat. Kemampuan perangkat desa dalam memahami, mengelola, dan memanfaatkan teknologi informasi menjadi faktor penentu utama efektivitas sistem. Tanpa keterampilan dasar dalam pengoperasian aplikasi dan pemeliharaan data, pemanfaatan SID sering kali terbatas pada fungsi administratif dasar saja. Di sisi lain, dukungan dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan penggunaan sistem tersebut. Tantangan utama yang dihadapi dalam proses implementasi meliputi keterbatasan jaringan internet di wilayah pedesaan, kurangnya pelatihan teknis yang berkelanjutan, serta resistensi terhadap perubahan budaya kerja manual yang telah lama mengakar (Aminah & Saksono, 2021). Kondisi ini memperlihatkan bahwa transformasi digital di tingkat desa bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga terkait dengan kesiapan sumber daya manusia dan adaptasi sosial.

Namun demikian, beberapa desa berhasil menunjukkan capaian positif melalui pengembangan inovasi lokal, seperti integrasi SID dengan aplikasi layanan administrasi kependudukan dan pelaporan keuangan desa berbasis open data. Inovasi ini lahir dari kesadaran perangkat desa akan pentingnya pengelolaan data yang terintegrasi dan terbuka bagi publik. Dalam praktiknya, integrasi tersebut memungkinkan data kependudukan, keuangan, dan kegiatan pembangunan desa untuk saling terhubung dalam satu sistem digital yang terpadu. Dengan demikian, proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara terpisah dan manual kini dapat dilakukan secara otomatis dan sinkron, mengurangi potensi kesalahan input, redundansi data, dan keterlambatan dalam penyampaian informasi.

Integrasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan publik, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap informasi pembangunan dan keuangan desa secara real-time. Masyarakat kini dapat dengan mudah mengakses data terkait anggaran desa, rencana pembangunan jangka menengah, serta laporan pelaksanaan kegiatan tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Selain itu, beberapa desa bahkan mengembangkan portal

daring yang memungkinkan warga memberikan masukan, melakukan pengaduan, atau memantau progres proyek pembangunan secara langsung melalui fitur partisipatif yang terhubung dengan SID. Kondisi ini mencerminkan terjadinya perubahan mendasar dalam hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat, dari hubungan yang bersifat hierarkis menuju hubungan yang lebih kolaboratif dan terbuka.

Lebih jauh lagi, keberhasilan desa dalam mengintegrasikan SID dengan aplikasi administrasi kependudukan dan pelaporan keuangan desa juga menunjukkan kemampuan adaptasi lokal terhadap tantangan digitalisasi. Dalam banyak kasus, inovasi tersebut muncul bukan karena intervensi eksternal, tetapi karena adanya kebutuhan internal untuk meningkatkan transparansi, akurasi data, serta kecepatan pelayanan publik. Dengan dukungan teknis yang memadai dan komitmen kepemimpinan kepala desa, sistem yang dikembangkan secara mandiri ini menjadi contoh nyata bahwa transformasi digital dapat tumbuh dari bawah (*bottom-up innovation*). Fenomena ini memperlihatkan bahwa kapasitas inovasi tidak hanya dimiliki oleh lembaga di tingkat pusat, tetapi juga dapat muncul secara organik di tingkat desa ketika ada kesadaran kolektif untuk memperbaiki tata kelola.

Selain meningkatkan kualitas pelayanan publik, integrasi SID juga berimplikasi pada peningkatan efektivitas pengawasan dan akuntabilitas penggunaan anggaran desa. Dengan sistem pelaporan keuangan berbasis open data, masyarakat dan lembaga pengawas dapat memantau penggunaan dana desa secara transparan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Akses informasi yang luas ini memperkecil peluang terjadinya penyelewengan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya publik. Dalam konteks pembangunan desa yang berkelanjutan, transparansi semacam ini menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

Upaya inovatif tersebut membuktikan bahwa dengan kreativitas, kepemimpinan yang visioner, dan dukungan kelembagaan yang memadai, SID dapat berfungsi sebagai platform inovatif yang memperkuat prinsip transparansi, efisiensi, dan partisipasi warga dalam proses pembangunan desa. Dukungan kelembagaan di sini mencakup tidak hanya pemerintah daerah dan lembaga teknis pendamping, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan serta menjaga keberlanjutan sistem. Sinergi antaraktor inilah yang pada akhirnya menciptakan ekosistem digital yang adaptif dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan adanya potensi replikasi model implementasi di wilayah lain dengan konteks sosial dan infrastruktur yang serupa. Desa-desanya yang telah berhasil mengembangkan inovasi digital berbasis SID dapat menjadi laboratorium pembelajaran (*learning village*) bagi daerah lain yang ingin mengadopsi model serupa. Proses replikasi ini dapat dilakukan melalui mekanisme kolaboratif antar-desa, misalnya melalui forum pertukaran praktik baik (*best practices*), program pelatihan lintas wilayah, atau pendampingan teknis yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten. Dengan pendekatan ini, transformasi digital di tingkat akar rumput tidak hanya terjadi secara sporadis, tetapi juga secara sistematis dan terukur.

Dalam jangka panjang, pengembangan inovasi lokal berbasis SID berpotensi mempercepat pemerataan transformasi digital di seluruh wilayah pedesaan Indonesia. Melalui penyebaran praktik baik tersebut, setiap desa dapat mengembangkan solusi yang disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, serta kapasitas sumber daya masing-masing. Dengan kata lain, SID dapat menjadi katalis dalam mendorong kemandirian digital desa yang berorientasi pada pelayanan publik, keterbukaan informasi, dan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa implementasi SID bukan hanya isu teknologi, tetapi juga proses pemberdayaan sosial dan reformasi kelembagaan di tingkat desa. Penerapan SID memerlukan pendekatan yang holistik, di mana aspek teknis, sosial, dan kelembagaan berjalan secara sinergis. Pendekatan kolaboratif yang melibatkan perangkat desa, masyarakat, serta dukungan dari pemerintah daerah dan lembaga pendamping menjadi kunci keberhasilan sistem ini dalam jangka panjang. Dengan demikian, SID berpotensi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih terbuka, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Sistem Informasi Desa (SID) secara signifikan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik di desa tertinggal di Bali. Penerapan sistem ini membawa dampak positif dalam mempercepat proses administrasi, menyediakan akses informasi yang lebih terbuka, serta memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Melalui SID, masyarakat dapat memperoleh informasi secara real-time mengenai kegiatan pemerintahan, alokasi dana desa, serta berbagai program pembangunan yang sedang dijalankan. Hal ini menjadikan proses pemerintahan di tingkat desa lebih terbuka dan

mudah diawasi oleh publik, sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan sosial dan mengurangi potensi penyimpangan administrasi.

Peningkatan kualitas pelayanan publik juga terlihat dari berkurangnya waktu dan biaya yang dibutuhkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administratif. Sistem digital yang diterapkan memungkinkan integrasi antara data kependudukan, pelayanan administrasi, dan pelaporan keuangan, sehingga proses birokrasi menjadi lebih efisien dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan publik meningkat seiring dengan tersedianya kanal informasi daring yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi maupun melakukan pemantauan terhadap kinerja pemerintah desa.

Faktor penentu keberhasilan implementasi SID meliputi kesiapan sumber daya manusia yang kompeten, dukungan infrastruktur digital yang memadai, serta adanya budaya partisipatif yang mengakar di masyarakat. Kesiapan aparatur desa dalam mengoperasikan sistem menjadi kunci utama dalam memastikan keberlanjutan penggunaan SID. Tanpa kompetensi teknis dan komitmen dari perangkat desa, sistem ini berpotensi tidak dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pelatihan literasi digital bagi aparatur serta masyarakat menjadi prioritas yang tidak dapat diabaikan. Infrastruktur digital seperti jaringan internet yang stabil dan perangkat keras yang memadai juga menjadi prasyarat keberhasilan penerapan SID, khususnya di wilayah pedesaan dengan kondisi geografis yang menantang.

Selain faktor teknis, dimensi sosial dan budaya juga berpengaruh besar terhadap efektivitas implementasi. Budaya partisipatif masyarakat Bali yang dikenal melalui sistem gotong royong dan musyawarah desa dapat menjadi fondasi kuat dalam mendukung keberhasilan SID. Ketika teknologi diintegrasikan dengan nilai-nilai lokal, proses digitalisasi menjadi lebih mudah diterima dan dijalankan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memfasilitasi sinergi antara aspek teknologi, kelembagaan, dan budaya lokal agar sistem dapat berkembang sesuai dengan karakteristik masing-masing desa.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat kebijakan pelatihan literasi digital, menyediakan pendampingan teknis berkelanjutan, serta mengembangkan regulasi yang menjamin keberlanjutan SID di tingkat desa. Kebijakan ini harus disertai dengan mekanisme evaluasi yang terukur untuk memantau kinerja sistem, baik dari aspek teknis maupun sosial. Selain itu, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan tinggi, dan sektor swasta dalam menciptakan ekosistem digital desa yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada analisis dampak ekonomi dan sosial jangka panjang dari implementasi SID di wilayah pedesaan. Kajian mendalam tentang pengaruh SID terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, tata kelola dana desa, serta dinamika partisipasi warga dalam pembangunan desa dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji potensi integrasi SID dengan sistem informasi lintas sektor, seperti sistem keuangan daerah, administrasi kependudukan nasional, atau platform open government data untuk memperkuat transparansi lintas level pemerintahan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa implementasi SID bukan hanya sekadar modernisasi teknologi, tetapi merupakan langkah strategis menuju transformasi tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan kolaborasi berbagai pihak, SID berpotensi menjadi instrumen utama dalam mewujudkan desa digital yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing di era transformasi digital nasional.

References

- Adeni, S. (2016). Information communication technology (ICT) and women empowerment for rural area. *Jurnal InterAct*, 5(2), 1-15.
- Aminah, S., & Saksono, H. (2021). Digital transformation of the government: A case study in Indonesia. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 37(2), 272-288.
- Anas, A., Arifin, I., Irwan, A. L., & Ansar, M. C. (2024). The The Application of E-Government in the Development of Village Government Democracy in Gowa Regency Indonesia. *Jurnal Publisitas*, 10(2), 173-185. <https://doi.org/10.37858/publisitas.v10i2.420>

- Aryani, L., & Kusumaningrum, R. (2024). Improving village information systems for sustainable development in Karawang Regency, Indonesia. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(3), 627-646. <https://doi.org/10.26618/ojip.v14i3.16303>
- Hajar, S., & Arma, N. A. (2024). Co-creating public value into digital-based public service innovation in the village governance. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(3), 516-538.
- Kesa, D. D., Nurfikri, A., & Lee, C. W. (2024). Evaluation of the Village Financial Information System (SISKEUDES) in Enhancing Governance and Financial Transparency in Indonesian Village Administration. *Khazanah Sosial*, 6(3), 427-446. <https://scholar.ui.ac.id/en/publications/evaluation-of-the-village-financial-information-system-siskeudes/>
- Matheus, R., Faber, R., Ismagilova, E., & Janssen, M. (2023). Digital transparency and the usefulness for open government. *International Journal of Information Management*, 73, 102690. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102690>
- Murdhani, L. A. (2025). The Implementation of Digital Governance in Indonesia: A Systematic Review of Challenges and Opportunities. *International Journal of Scientific Research*, 2(01). <https://doi.org/10.62894/hw14ch33>
- Olphert, W., & Damodaran, L. (2007). Citizen participation and engagement in the design of e-government services: The missing link in effective ICT design and delivery. *Journal of the Association for Information Systems*, 8(9), 27. <https://aisel.aisnet.org/jais/vol8/iss9/27/>
- Reggi, L., & Dawes, S. (2016, August). Open government data ecosystems: Linking transparency for innovation with transparency for participation and accountability. In *International Conference on Electronic Government* (pp. 74-86). Cham: Springer International Publishing.
- Santoso, L. (2025). Evaluating Digital Readiness for Adopting Mobile-Based Public Service Information Systems in Rural Areas. *Teknik: Jurnal Ilmu Teknik dan Informatika*, 5(2), 108-127. <https://doi.org/10.51903/teknik.v5i2.978>
- Taufiq, O. H., Yuliani, D., & Hermawandi, D. (2019). Tata Kelola Pemerintah Desa Berbasis E-Government Menuju Good Governance. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(1), 145-152. <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v6i1.1987>
- Widiyarta, A., Haniyuhana, A., & Bataha, K. (2024). Transformasi Sosial Budaya Masyarakat pada Implementasi Program Smart Village dalam perspektif Smart Governance. *Religion, Education, and Social Laa Roiba Journal (RESLAJ)*, 6(4), 2030-2041. <https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/reslaj/1903>
- Wijaya, I. D. (2024). Challenges and Opportunities in Digital Technology Adoption for Government in Indonesia. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 6(2), 137-146.
- Yimer, M. (2015). The Role of ICT for good governance and agricultural development in Ethiopia: local evidence from Southern Ethiopia. *International Journal of Political Science and Development*, 3(1), 30-39.